

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan sektor publik di Indonesia semakin pesat seiring dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yang menjadi landasan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Pada hakekatnya otonomi daerah akan memberikan peluang yang besar kepada daerah untuk selalu mengoptimalkan potensi yang dimiliki, baik itu yang menyangkut sumber daya manusia, sumber pembiayaan, maupun sumber daya lain yang merupakan kekayaan daerah. Dengan adanya otonomi daerah maka, pemerintah daerah diharapkan semakin mandiri dan mampu mengurangi ketergantungannya terhadap pemerintah pusat, baik dalam hal pembiayaan pembangunan maupun pengelolaan keuangan daerah.

Keuangan daerah harus dikelola dengan baik karena, akan berpengaruh terhadap perkembangan kinerja pemerintah daerah serta dapat meningkatkan pelayanan untuk kesejahteraan masyarakat. Adanya tuntutan akuntabilitas publik dari masyarakat diharapkan akan menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. Pemerintah daerah selaku pelayan masyarakatatataupenerima amanah yang dalam pelaksanaanyadituntut agar dapat meningkatkan kinerja serta akuntabilitas atas pengelolaan sumber daya yang dipercayakan oleh rakyat sebagai pemilik sumber daya. Sehingga apabila Pemerintah daerah dapat melaksanakan secara baik dan akan mampu mewujudkan tata kelola keuangan serta dapat meningkatkan sumber daya publik yang dikelolanya, mengingat tolok ukur adanya peningkatan kinerja pemerintah daerah salah satunya yaitu kemampuan dalam bidang tata kelola

keuangan daerah. Penilaian terhadap kinerja keuangan daerah mempunyai peranan yang penting dalam menilai akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah serta mengukur kemampuan keuangan daerah dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan serta sebagai upaya dalam terwujudnya *good governance*.

Kaho (2005) menyatakan bahwa kemampuan *self supporting* dalam bidang keuangan sebagai salah satu kriteria yang penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan keuangan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya, sehingga kinerja keuangan sebagai faktor yang esensial dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dan menjadi penentu dalam pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintah daerah. Dalam melakukan analisis kinerja keuangan perlu memperhatikan metode *value for money* dalam menjalankan setiap aktivitasnya. Metode *value for money* merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas (Ulum, 2004).

Azhar (2010) menyatakan bahwa dalam pelaksanaan otonomi daerah menuntut kinerja keuangan dalam dua aspek, yaitu daerah diberi kewenangan mengurus pembiayaan daerah dengan kekuatan utama pada kemampuan pendapatan asli daerah dan pengelolaan keuangan daerah harus lebih akuntabel dan transparan agar lebih efisien dan efektif dalam pengeluaran daerah. Pemerintah daerah harus mampu meningkatkan kinerjanya untuk meningkatkan kemandiriannya dengan menggali sumber penerimaan yang berasal dari potensi daerah yang dimiliki untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan

pelayanan publik serta atas pelaksanaan pengelolaan dilakukan secara lebih akuntabel dan transparan sehingga pemerintah lebih efektif, efisien dan ekonomis dalam pengelolaan pengeluaran.

Liando *et al.* (2014) melakukan penelitian tentang analisis kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menggunakan metode *value for money*. Memperoleh hasil bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe dari segi ekonomis untuk tahun 2012 dan 2013 disimpulkan bahwa realisasi belanja lebih besar dari total realisasi penerimaan daerah secara keseluruhan. Dari segi efisiensi untuk tahun 2012 dan tahun 2013, menunjukkan bahwa dapat dikatakan kinerja pengelolaan anggaran belanja pemerintah sudah baik karena nilai output lebih besar dari nilai input yang digunakan. Dari segi efektifitas untuk tahun 2012 dan 2013 bahwa pengelolaan anggaran ditahun 2012 lebih efektif dibanding dengan tahun 2013.

Salah satu hal yang terpenting dalam menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah adalah adanya upaya mengoptimalkan manajemen dan kesiapan sumber daya manusia dalam melaksanakan pemungutan pendapatan asli daerah, mengingat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah dengan melakukan perbaikan regulasi pengaturan tentang mekanisme pengelolaan penerimaan daerah baik dari sisi besaran tarif maupun mekanisme pemungutannya sehingga diharapkan mampu meningkatkan pendapatan asli daerah.

Berdasarkan informasi yang peneliti peroleh dari Badan Pengelolaan Keuangan Aset dan Daerah Kabupaten Lombok Timur bahwa, pada Anggaran Belanja masih terdapat program kegiatan yang mengakibatkan pemborosan dan kebocoran APBD. Program kegiatan tersebut antara lain terdapat pada SKPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah yaitu, pada kegiatan Diklat Struktural bagi PNS Daerah sebesar Rp.875.575.000(serta Pada Kegiatan Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp.46.423.000.000 (BPKAD Kabupaten Lombok Timur, 2017). Kegiatan Diklat Struktural sudah tidak perlu dianggarkan lagi, karena sudah tidak menjadi syarat bagi PNS untuk menduduki jabatan struktural dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang syarat PNS yang menduduki jabatan struktural yaitu harus mengikuti uji Kompetensi. Kegiatan Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bukan merupakan belanja wajib, tetapi Pada Anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten lombok timur merupakan belanja yang harus diprioritaskan.

Penelitian ini penting dilakukan karena Kabupaten Lombok Timur adalah daerah yang kemampuan keuangannya masih rendah serta ketergantungan pembiayaan belanja melalui dana pemerintah pusat masih tinggi. Hal ini bisa dilihat dari rasio pendapatan transfer terhadap total pendapatan daerah Kabupaten Lombok Timur, tercatat bahwa pada tahun 2017 mencapai 83,90%. Sehingga hasil penelitian ini berguna untuk pengambilan keputusan bagi Pemerintah Lombok Timur dalam mengelola keuangan daerahnya.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijabarkan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur Dengan Menggunakan Metode *Value For Money* Tahun 2013-2017”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: “Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur tahun 2013-2017 jika di analisis menggunakan metode *value for money*”?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur dengan menggunakan metode *value for money* tahun 2013-2017.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **a. Bagi Instansi Pemerintah**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pertimbangan dan evaluasi bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur agar dapat meningkatkan kinerja keuangannya sehingga dapat berjalan dengan ekonomis, efisien, dan efektif.

#### **b. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dan referensi untuk penelitian selanjutnya yang berguna untuk menambah pengetahuan dan wawasan khususnya dalam kajian bidang Akuntansi Sektor Publik mengenai metode *value for money*.